

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis

#### A.1. Dasar Hukum

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa merupakan pendukung implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Benoa Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan PSDKP Benoa. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian /Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah system yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

### **A.3. Basis Akuntansi**

Pangkalan PSDKP Bena menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan

dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pangkalan PSDKP Benoa yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Benoa adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

### (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

### (4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan sistem FIFO (First In First Out)

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000

(dua puluh lima juta);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset  
Tetap

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Profil Pangkalan  
Pengawasan  
Sumber Daya  
Kelautan dan  
Perikanan Benoa*

**PANGKALAN PSDKP BENOA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pangkalan PSDKP Benoa mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pangkalan PSDKP Benoa** terdiri dari **101** pegawai yang terdiri dari 66 Orang PNS dan 35 Orang THL/Tenaga Kontrak. Pangkalan PSDKP Benoa saat ini terdiri dari UPT yang berkedudukan di Bali dengan didukung 6 kantor Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan rincian: Satwas SDKP Lamongan (Provinsi Jawa Timur), Satwas SDKP Surabaya (Provinsi Jawa Timur), Satwas SDKP Probolinggo (Provinsi Jawa Timur), Satwas SDKP Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), Satwas SDKP Jembrana

(Provinsi Bali) dan Satwas SDKP Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat) Adapun Tugas dan Fungsi dari **Pangkalan PSDKP Benoa** adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dang.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	
	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		-
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	11.033.463.000	12.557.913.000
Belanja Barang	24.344.055.000	22.500.074.000
Belanja Modal	5.746.181.000	364.621.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>41.123.699.000</b>	<b>35.422.608.000</b>

Penjelasan revisi pagu anggaran yang berada di Pangkalan PSDKP Benoa terdiri dari:

- Revisi ke 1 Tanggal 30 Januari 2025 Adanya Pemutakhiran Data dan petunjuk operasional kegiatan tanpa merubah nilai pagu senilai Rp. 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 2 Tanggal 24 Februari 2025 adanya pemutakhiran rencana penarikan dana dan adanya penambahan blokir perjalanan dinas tanpa merubah nilai pagu senilai Rp. 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 3 Tanggal 24 Maret 2025 adanya perpindahan output Cadangan pada kegiatan perawatan armada kapal pengawas tanpa merubah nilai pagu senilai Rp. 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 4 Tanggal 14 April 2025 adanya pembukaan blokir anggaran operasi kapal pengawas dan operasional perkantoran tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 5 tanggal 22 April 2025 adanya pemutakhiran rencana penarikan dana tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi ke 6 tanggal 23 Mei 2025 adanya pembukaan blokir sumber dana PNBOP operasional kapal pengawas senilai Rp. 6.967.777.000 tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00

- Revisi ke 7 tanggal 14 Juli 2025 adanya revisi Hal III Dipa dan pemutakhiran data tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi ke 8 tanggal 14 Oktober 2025 adanya Pemutakhiran RPD Hal III Dipa TW 4 tahun anggaran 2025 tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi ke 9 tanggal 19 November 2025 adanya Penghapusan dan buka Blokir Anggaran Sehingga Mengurangi Pagu menjadi senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 10 tanggal 26 November 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 11 tanggal 11 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 12 tanggal 11 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 13 tanggal 24 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 14 tanggal 29 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00

Realisasi  
Pendapatan  
Rp36.351.  
247,00.

## **B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.351.247,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah Pendapatan dari

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan Nilai Rp 26.075.247,00
  - a. Berdasarkan risalah lelang nomor 24/14.01/2025-01 tanggal 16 Januari 2025 sebesar Rp18.333.000,00 berupa Monumen kapal yang sudah rusak berat disetor tanggal 21 Januari 2025 dengan nomor NTPN 272870NA0DE12CIM.
  - b. Berdasarkan risalah lelang nomor 196/14.01/2025.01 tanggal 7 Mei 2025 sebesar Rp2.638.247,00 berupa satu paket alat dan Mesin yang sudah rusak berat sejumlah 210 NUP telah disetor tanggal 9 Mei 2025 dengan nomor NTPN BC5F655DFIM2DKH2.

- c. Berdasarkan risalah lelang nomor 253/14.01/2025.01 tanggal 11 Juni 2025 sebesar Rp5.104.000,00 berupa 1 unit motor roda dua dan 1 unit waterfilter rusak berat telah disetor pada tanggal 19 Juni 2025 dengan nomor NTPN 2CCAE55DFIPAUKCN
- d. Berdasarkan risalah Lelang nomor 415/14.01/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp 5.800.000,00 berupa I Unit Inflatable Life Craft rusak berat yang sudah di setor pada tanggal 1 September 2025 dengan nomor NTPN 656AE55DFJ106LJ3
- e. Berdasarkan risalah Lelang nomor 665/14.01/2025-01 tanggal 17 Desember 2025 sebesar Rp 4.476.000,00 berupa I Unit motor megapro rusak berat yang sudah di setor pada tanggal 18 Desember 2025 dengan nomor NTPN 1BF188N3ETKNMLLP

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	36.351.247,00	12.202.000,00	298
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	900.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>36.351.247</b>	<b>13.102.000</b>	<b>177,45</b>

Realisasi  
Belanja  
Rp32.605.  
487.721,0  
0.

**B.2.BELANJA**

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp32.605487.721,00 atau 92.05% dari anggaran belanja sebesar Rp35.422.608.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	12.557.913.000	12.547.988.688	99,92
Belanja Barang	22.500.074.000	19.693.238.927	87,53
Belanja Modal	364.621.000	364.620.199	5,79
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>35.422.608.000</b>	<b>32.605.847.814</b>	<b>100</b>
Pengembalian Belanja		360.093	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>41.123.699.000</b>	<b>32.605.487.721</b>	<b>92,05</b>

Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Realisasi Belanja 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.39 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	30 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.547.628.595	11.612.759.379	8,05
Belanja Barang	19.693.238.927	16.133.959.590	22,06
Belanja Modal	364.620.199	2.334.818.380	(84,38)
<b>Jumlah</b>	<b>32.605.487.721</b>	<b>30.081.537.349</b>	<b>8,39</b>

Realisasi Anggaran Prioritas Nasional lingkup Pangkalan PSDKP Bena Tahun Anggaran 2025 senilai Rp17.125.158.124 dari pagu senilai Rp19.724.287.000 Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress
2351	BCE	U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	115,321.000	115,295,500	N	5	Perkara	5	100
2351	BCE	U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	83,468.000	83,251,272	N	1	Perkara	1	100
2352	BHD	001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	20,505.000	20,458,200	N	1	Operasi	1	100
2350	QHD	001	Operasi Kapal Pengawas	17,036,016.000	14,419,700,993	N	46	Operasi	46	100
2350	QHD	003	Operasi Speedboat Pengawas	319,740.000	319,399,270	N	10	Operasi	10	100
2352	QIC	001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	337,163.000	337,078,299	N	40	Lembaga	40	100
2352	QIC	002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	349,839.000	349,834,744	N	25	Lembaga	25	100
2350	RCG	001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	1,480,235.000	1,480,139,846	N	6	Unit	6	100

Dalam Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Pangkalan PSDKP Benoa terdapat pada fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan rincian sebagaimana terlampir :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032  
SATUAN KERJA : 225135

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PANGKALAN PSDKP BENOA

Tanggal : 23/01/26 4:11 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_irt\_fstpg\_sakker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2390	Pemantuan, Operas Armada dan Infrastruktur Pengawasan	308.542.318.000	283.703.874.000	127.266.381.529	0	127.266.381.529	88.11	18.034.612.474
2391	Pengawasan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	4.454.890.000	2.783.546.000	2.779.894.808	0	2.779.894.808	99.88	3.281.182
2392	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	27.181.816.000	9.865.298.000	9.863.187.402	0	9.863.187.402	99.99	1.600.599
2393	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	4.200.306.000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	344.388.886.000	276.392.318.000	239.792.213.739	0	239.792.213.739	84.74	34.635.864.264
WA	Program Dukungan Manajemen							
2396	Dukungan Manajemen Internal Logistik Dipas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	267.479.700.000	282.249.778.000	278.852.414.420	6.481.874	279.841.932.749	98.72	3.590.845.254
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	267.479.700.000	282.249.778.000	278.852.414.420	6.481.874	279.841.932.749	98.73	3.590.845.254
	JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	611.838.386.000	558.637.796.000	518.404.628.159	6.481.874	518.398.146.482	92.8	40.239.645.518
	JUMLAH FUNGSI EKONOMI	611.838.386.000	558.637.796.000	518.404.628.159	6.481.874	518.398.146.482	92.8	40.239.645.518

Belanja  
Pegawai  
Rp12.547.  
628.595,0  
0

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.547.628.595,00 dan Rp11.612.759.376,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.5% dari 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan Adanya

penambahan PPPK dan penambahan kenaikan grade jabatan fungsional pengawas perikanan dan penambahan personal pindahan dari lintas UPT.

*Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.477.819.616	4.368.753.090	2,50
Belanja Gaji dan Tunjangan P3K	1.465.709.493	1.163.567.896	
Belanja Lembur	402.203.000	405.454.000	(0,80)
Belanja Tunjangan Kinerja	6.202.256.579	5.674.986.655	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>12.547.988.688</b>	<b>11.612.761.641</b>	<b>8,05</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(360.093)	(2.265)	187,913,22
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.547.628.595</b>	<b>11.612.759.376</b>	<b>8,05</b>

Tahun Anggaran 2025 Pangkalan PSDKP Benoa terdapat pengembalian Belanja Pegawai berjumlah Rp 360.048 ,00 dikarenakan pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS senilai Rp 48,00 dan pengembalian belanja berupa belanja Tunjangan umum PNS senilai Rp 360.000,00 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji pegawai PNS bernilai Rp48,00 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan Nomor SPM 00025
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan tunjangan Umum PNS bernilai Rp360.000,00 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan Nomor SPM 00330
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji pegawai PNS bernilai Rp45,00 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan Nomor SPM 00566

Belanja  
Barang  
Rp19.693.  
238.927,0  
0

**B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 19.693.238.927,00 dan Rp 16.133.959.590,00.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 22.06 % dari 31 Desember 2024 karena adanya penambahan hari operasi kapal pengawas

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.878.104.670	2.548.640.723	(26,31)
Belanja Barang Non Operasional	12.934.533.548	3.961.735.751	226,49
Belanja Persediaan	77.108.592	129.036.711	(40,24)
Belanja Jasa	1.615.076.673	1.253.570.855	28,84
Belanja Pemeliharaan	2.068.353.279	3.530.508.649	(41,41)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.120.062.165	4.721.585.501	(76,28)
Jumlah Belanja Kotor	19.693.238.927	16.145.078.190	21,98
Pengembalian Belanja	-	(11.118.600)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.693.238.927</b>	<b>16.133.959.590</b>	<b>22,06</b>

Terdapat realisasi belanja BBM Kapal Pengawas Hiu 09 dan Kapal Pengawas Hiu Macan tutul 02 pada Pangkalan PSDKP Bena meliputi:

KAPAL PENGAWAS	REALISASI ANGGARAN BBM KAPAL PENGAWAS DAN HARI OPERASI										PROGNOSA REALISASI HARI OPERASI S.D AKHIR TAHUN 2025			
	ANGGARAN (Rp)					HARI OPERASI (HARI)								
	PAJU BBM Per 31 Juli 2025	MP PISP Tahap 1	REVISI (+ / -) November	PAJU BBM Per 31 November 2025	REALISASI S.D 31 Desember 2025	% REALISASI	SISA ANGGARAN PER 31 Desember 2025	% SISA	TARGET AWAL	TARGET MENYUSUT			REALISASI	SISA HARI
PAKSIKALAN PSDKP BENOA	4.434.300.000	4.180.164.000	3.591.881.000	11.034.728.000	11.034.728.000	100,00%	-	0,00%	31,00	46,00	70,50	0	87,00	PAKSIKALAN PSDKP BENOA
KP HIU MACAN TUTUL 02	1.179.461.500	1.821.300.000	3.729.871.500	9.036.518.000	9.036.518.000	100,00%	-	0,00%	35,00	46,00	87,00	0	100,00	KP HIU MACAN TUTUL 02
KP HIU 09	1.240.234.500	1.588.164.000	1.840.508.500	1.027.790.000	1.027.790.000	100,00%	-	0,00%	35,00	46,00	34,00	0	74,00	KP HIU 09
<b>TOTAL</b>	<b>6.853.996.000</b>	<b>7.589.628.000</b>	<b>9.162.261.000</b>	<b>31.098.046.000</b>	<b>31.098.046.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>31,00</b>	<b>46,00</b>	<b>71,50</b>	<b>0</b>	<b>81,00</b>	

Belanja Modal Rp364.620.199,00.

**B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp364.620.199,00 dan Rp2.334.818.380,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan -68.77% dari 31 Desember 2024 dikarenakan adanya pemblokiran

anggaran belanja modal sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah			0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.620.199	447.632.500	(18,54)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.571.744.784	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		322.811.000	0,00
Belanja Modal Lainnya			0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>364.620.199</b>	<b>2.342.188.284</b>	<b>-84,43</b>
Pengembalian		-7369904	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>729.240.398</b>	<b>2.334.818.380</b>	<b>-69,77</b>

**B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**

Pangkalan PSDKP Benoa Tidak mempunya Anggaran belanja modal Tanah.

**B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 364.620.122,00, mengalami penurunan 18.54% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp447.632.500,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	30 Sep 2025	30 Sep 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.812.699	447.632.500	-48,88
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	135.807.500	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>364.620.199</b>	<b>447.632.500</b>	<b>-18,64</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>364.620.199</b>	<b>447.632.500</b>	<b>-18,64</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pembelian secara langsung sebesar Rp364.620.199,00 terdiri dari:

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Lemari Es	1	Buah	2.425.000,00
CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	29.500.000,00
Handy Talky (HT)	4	Buah	27.999.999,00
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	30.000.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	4.620.700,00
A.C. Split	3	Buah	25.500.000,00
Peralatan Permainan Lainnya	1	dummy	10.368.000,00
GPS Receiver	1	Buah	6.199.000,00
Mesin Cuci	1	Buah	2.778.000,00
Lap Top	1	Buah	17.950.000,00
Kamera Udara	1	Buah	68.950.000,00
Lemari Es	1	Buah	6.900.000,00
A.C. Split	1	Buah	8.500.000,00
Lemari Es	1	Buah	5.992.500,00
A.C. Split	3	Buah	20.022.000,00
Radar Beacon	1	Buah	84.915.000,00
P.C Unit	1	Buah	12.000.000,00

### **B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Ged	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya**

Pangkalan PSDKP Bena tidak memiliki anggaran belanja modal lainnya.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:  
*Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
Uang Tunai di Brankas	-	-
Rekening Bendahara Pengeluaran	-	-
BP Uang Muka	-	-
Kwitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Belanja Dibayar  
Dimuka Rp  
16.666.667,00

**C.2 Belanja Dibayar Dimuka**

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.666.667,00 dan Rp52.500.000,00.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang dan jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

No	Uraian Sewa	Uraian		
		Nilai Kontrak	Kotrak Berjalan	Sisa kontrak
1	Sewa Kantor di Gili Air Lombok Utara, NTB terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026	25.000.000	8.333.333	16.666.667
<b>Total</b>		<b>25.000.000</b>	<b>8.333.333</b>	<b>16.666.667</b>

Persediaan  
Rp1.515.709.331,  
00.

#### C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.515.709.331,00 dan Rp233.664.119,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

JENIS	31 Des 2025	31 Des 2024
Barang Konsumsi	1.515.709.331	233.664.119
<b>Jumlah</b>	<b>1.515.709.331</b>	<b>233.664.119</b>

#### Rincian Mutasi Persediaan

KODE	URAIAN	NILAI SD 31 DES 2025	MUTASI		NILAI SD 31 DES 2024
			TAMBAH	KURANG	
13710	Barang Konsumsi	45.121.542	11.521.542	12.553.197	33.589.887
13711	Barang Jasa Pemerintah	0	7.000	7.000	0
13714	Salu-Catani	58.522.577	1.621.701.574	351.216.287	1.499.027.864
13717	Persediaan Mutasi dan Lain	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>213.644.119</b>	<b>1.633.229.616</b>	<b>464.776.584</b>	<b>1.438.700.211</b>

Tanah  
Rp139.850.310.0  
0000

#### C.5 Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp139.850.310.000 ,00 dan Rp139.850.310.000,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp 139.850.310.000</b>
Mutasi tambah:	
Hibah Masuk	Rp -
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>Rp 139.850.310.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	Rp -
<b>Nilai Buku per 31 Des 2025</b>	<b>Rp 139.850.310.000</b>

Peralatan dan  
Mesin Rp  
74.862.612.072,0  
0.

### C.6 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp74.862.612.072,00 dan Rp25.912.382.635,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>25.912.382.635</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	364.620.199
transfer masuk	Rp	49.519.531.777
reklas masuk	Rp	-
Pengembangan Nilai Aset		
Hibah keluar	Rp	(167.403.000)
Transfer Keluar	Rp	(31.599.000)
Koreksi pencatatan	Rp	-
reklas keluar	Rp	-
penghentian aset dari penggunaan	Rp	(734.920.539)
<b>Saldo per 31 Des 2025</b>	<b>Rp</b>	<b>74.862.612.072</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Des 2025	Rp	(70.008.542.014)
<b>Nilai Buku per 30 September 2025</b>	<b>Rp</b>	<b>4.854.070.058</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:  
Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembelian

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Lemari Es	1	Buah	2.425.000,00
CCTV - Camera Control			
Television System	1	Buah	29.500.000,00
Handy Talky (HT)	4	Buah	27.999.999,00
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	30.000.000,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	4.620.700,00
A.C. Split	3	Buah	25.500.000,00
Peralatan Permainan Lainnya	1	dummy	10.368.000,00
GPS Receiver	1	Buah	6.199.000,00
Mesin Cuci	1	Buah	2.778.000,00
Lap Top	1	Buah	17.950.000,00
Kamera Udara	1	Buah	68.950.000,00
Lemari Es	1	Buah	6.900.000,00
A.C. Split	1	Buah	8.500.000,00
Lemari Es	1	Buah	5.992.500,00
A.C. Split	3	Buah	20.022.000,00
Radar Beacon	1	Buah	84.915.000,00
P.C Unit	1	Buah	12.000.000,00

Pada neraca percobaan AkruaI Terdapat transfer

masuk senilai Rp5.255.983.272,00 hal tersebut terbentuknya akumulasi penyusutan BMN.

Transfer masuk senilai Rp 49.519.531.777,00 berupa :

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Drone	1	Buah	3.169.748.797
Printer (Peralatan Personal)	2	Buah	6.655.000
Scanner (Peralatan Personal)	1	Buah	6.713.201
Alat Studio	1	dummy	15.856.350
Infrared Thermometer	1	Buah	1.900.000
Mesin Pengering	1	Buah	9.609.985
Lemari Es	3	Buah	24.281.400
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Buah	14.987.250

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Radar Data Processing System/RDPS	1	Buah	371.250.000
Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah	13.200.000
A.C. Split	3	Buah	25.707.860
Camera Digital	2	Buah	61.543.900
Rak Besi	1	Buah	9.500.000
Peta	1	Buah	1.540.000
Dispenser	2	Buah	8.030.000
GPS Receiver	1	Buah	77.000.000
Kapal Pengawas	1	Unit	44.124.025.743
Televisi	1	Buah	4.995.000
Sepeda Motor	3	Unit	46.317.500

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Water Treatment (Mesin Proses)	1	Unit	706.785.200
Peta Digital	1	Buah	323.649.040
Mesin Cuci	1	Buah	8.039.295
Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Buah	52.919.548
Mesin Battery Set / Pengisi	1	Buah	15.125.000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1	Buah	2.966.326
CCTV - Camera Control Television	1	Buah	23.254.000
Lap Top	2	Buah	32.871.000

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Teropong Sensor Panas	1	unit	138.117.125
Alat Komunikasi	1	dummy	10.545.000
Handy Cam	1	Buah	5.200.000
Instrument Probe/Sensor Lainnya	1	dummy	361.900.000
Lap Top	1	Buah	14.400.000
Tablet PC	1	Buah	6.919.200
Note Book	1	Buah	19.039.000
Kursi	15	Buah	18.589.097
Workstation	5	Buah	110.000.000

Transfer Keluar Senilai Rp 31.599.000,00 Berupa :

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Telephone Mobile	-1	Buah	-7500000
Tablet PC	-1	Buah	-9499000
Sepeda Motor	-1	Unit	-14600000

Hibah Keluar Senilai Rp 167.403.000,00 berupa : 1 Unit speedboat di hibahkan ke Pokmaswas

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN

Kantor : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
 Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa  
 Kode Satuan Kerja : 032.05.2200.225185.000.813

No.	Kode Barang	Nama Barang	RUP	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan	
1.	302502000	Speed Boat Motor Tempel	9	MARLIN 06	2003	1 Unit	167.403.000	Hilang karena Hilangnya Cemarit Kira Girah Mangrove Sejahtera	
JUMLAH							1 Unit	167.403.000	

s.d. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Penghentian asset dari penghentian Rp 734.920.539 berupa barang

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

MA	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	228.812.699
532121	BM Penambahan Peralatan dan Mesin	135.807.500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>364.620.199</b>

Gedung dan Bangunan  
Rp8.914.388.606,00.

### C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp8.914.388.606,00 dan Rp8.914.388.606,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>8.914.388.606</b>
Mutasi tambah:		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	-
Koreksi Hasil Semu Penilaian Kembali	Rp	-
Hibah Keluar	Rp	-
<b>Saldo per 31 Des 2025</b>	<b>Rp</b>	<b>8.914.388.606</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	Rp	(1.317.201.289)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>Rp</b>	<b>7.597.187.317</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan

### C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp1.056.037.336,00.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.056.037.336,00 dan Rp1.056.037.336,00. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp 1.056.037.336</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Pengembangan Melalui KDP	Rp -
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan Nilai Berkurang	Rp -
Transfer Keluar	Rp -
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp -
<b>Saldo per 31 Des 2025</b>	<b>Rp1.056.037.336</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	419.888.448
<b>Nilai Buku Per 31 Des 2025</b>	<b>Rp 1.475.925.784</b>

Aset Tetap Lainnya Rp 323.649.040,00.

### C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp323.649.040,00 dan Rp0,00.

Terdapat tranfer masuk dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada PSDKP berupa 1 unit Radar Data Processing System/RDPS nomor B. 50/PSDKP.1/PL. 450/I/2025 tanggal 1 Januari 2025

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00

### C.10 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing Rp0,00 dan Rp98.068.500,00 .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 71.745.631.751,00

### C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp71.745.631.751,00 dan Rp

25.091.285.599,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	139.850.031.000	-	139.850.031.000
2	Peralatan dan Mesin	74.862.612.072	70.008.542.014	4.854.070.058
3	Gedung dan Bangunan	8.914.388.606	1.317.201.289	7.597.187.317
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.056.037.336	419.888.448	636.148.888
5	Aset Tetap Lainnya	323.649.040	-	323.649.040
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>225.006.718.054</b>	<b>71.745.631.751</b>	<b>13.411.055.303</b>

Aset Tak Berwujud Rp0

**C.12 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
Hibah Masuk	Rp	-
<b>Mutasi kurang:</b>		
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	-
<b>Saldo per 31 Des 2025</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Amortisasi Penyusutan 31 Des 2025	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Des 2025</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat transaksi mutasi penambahan dan pengurangan pada aset tak berwujud.

AsetLain-Lain  
Rp98.068.500,00

### C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp98.068.500,00 dan Rp1.167.751.915,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp 1.167.751.915</b>
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	
Mutasi keluar:	
Penghapusan BMN	Rp (1.167.751.915)
Penghentian Penggunaan	Rp (98.068.500)
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>Rp (98.068.500)</b>
Amortisasi Penyusutan per 31 Des 2025	Rp -
<b>Nilai Buku per 31 Des 2025</b>	<b>Rp (98.068.500)</b>

Rincian Aset Lain – lain adalah sebagai berikut:  
Kontruksi Dalam Pengerjaan yang di hentikan sementara adalah pengadaan jasa konsultasi perencanaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran 85%Pekerjaan Perencanaan Teknis/master Plan Pembangunan POS Pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa TA 2024 nomor 2692/SPK/PPK/PSDKPLan.4/PL.430/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 senilai 83.358.225
- Pembayaran termin 2 (15%) pekerjaan Perencanaan Teknis Master Plan Pembangunan Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa 2692/SPK/PPK/PSDKPLan.4/PL.430/IX/2

024 Tanggal 20 September 2024 senilai  
14.710.275

LAPORAN BAGIAN RUANG PENGUMUM  
KONTRAKSI DALAM PEROLEHAN  
IBUKAN PEKERJAAN SUDUT KECAMPAHAN BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KETERANGAN	31 Desember 2025		31 Desember 2024	
	Saldo	Nilai	Saldo	Nilai
001111				
001112				
001113				
001114				
001115				
001116				
001117				
001118				
001119				
001120				
001121				
001122				
001123				
001124				
001125				
001126				
001127				
001128				
001129				
001130				
001131				
001132				
001133				
001134				
001135				
001136				
001137				
001138				
001139				
001140				
001141				
001142				
001143				
001144				
001145				
001146				
001147				
001148				
001149				
001150				
001151				
001152				
001153				
001154				
001155				
001156				
001157				
001158				
001159				
001160				
001161				
001162				
001163				
001164				
001165				
001166				
001167				
001168				
001169				
001170				
001171				
001172				
001173				
001174				
001175				
001176				
001177				
001178				
001179				
001180				
001181				
001182				
001183				
001184				
001185				
001186				
001187				
001188				
001189				
001190				
001191				
001192				
001193				
001194				
001195				
001196				
001197				
001198				
001199				
001200				
TOTAL				

Diproses: 11/09/2025  
Menyusun: [nama]

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp(0,00)

### C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp(1.150.918.915,00).

Uang Muka dari  
KPPN Rp0,00.

### C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada  
Pihak Ketiga Rp  
3.600.626,00

### C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.600.626,00. dan Rp23.706.242,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Tagihan utang pada pihak ketiga adalah berupa pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pegawai pangkalan PSDKP Benoa, sedangkan utang

yang belum ditagihkan adalah transaksi yang belum terbit SP2D berupa penggantian uang persediaan belanja barang berupa belanja keperluan sehari-hari perkantoran.

Rincian Tagihan Bulan Desember

Tagihan	Benca	Lamongan	Surabaya	Probolinggo	Banyuwangi	Jemberana	Lombok Timur	Total
Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
Air	1.948.076,00	50.350,00	-	-	46.700,00	-	62.250,00	2.107.376,00
Internet	-	-	-	957.450,00	-	535.800,00	-	1.493.250,00
<b>Total</b>	<b>1.948.076,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>-</b>	<b>957.450,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>535.800,00</b>	<b>62.250,00</b>	<b>3.600.626,00</b>

Ekuitas Rp  
154.882.609.175,  
00.

### C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp154.882.609.175,00 dan Rp151.019.192.355,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB  
Rp0,00

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai Rp  
12.547.628.595,00.

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.547.628.595,00 dan Rp11.612.759.376,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025  
dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.243.732.260,00	3.215.163.500,00	0,89
Beban Pembulatan gaji	43.242,00	45.758,00	(5,50)
Beban Tunj. Suami/Istri	256.692.810,00	251.343.670,00	2,13
Beban Tunj. Anak	93.335.478,00	94.829.396,00	(1,58)
Beban Tunj. Struktural	18.900.000,00	20.160.000,00	(6,25)
Beban Tunj. Fungsional	164.870.000,00	163.280.000,00	0,97
Beban Tunj. Pph	17.626.893,00	18.867.521,00	(6,58)
Beban Tunj. Beras	202.920.840,00	205.093.440,00	(1,06)
Beban Uang makan	404.888.000,00	324.793.000	24,66
Beban Tunj. Umum	74.450.000,00	75.175.000,00	(0,96)
Beban Uang Lembur	281.506.000,00	255.924.000,00	10,00
Beban Pegawai (Tunj. Khusus)	4.760.054.603,00	4.490.992.118,00	5,99
Beban Gaji Pokok PPPK	1.076.294.400,00	871.785.400,00	23,46
Beban Pembulatan Gaji PPP	21.447,00	19.738,00	8,66
Beban Tunjangan Suami/Istri PPP	71.821.530,00	55.532.890,00	29,33
Beban Tunjangan Anak PPPK	21.224.336,00	17.917.128,00	18,46
Beban Tunjangan Fungsional PPP	75.600.000,00	76.020.000,00	(0,55)
Beban Tunjangan Beras PPPK	69.450.780,00	56.777.280,00	22,32
Beban Uang Makan PPPK	138.427.000,00	85.515.000,00	61,87
Beban Lembur PPPK	120.697.000,00	149.530.000,00	(19,28)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kec	1.442.201.976,00	1.183.994.537,00	21,81
Beban Tunjangan Umum PPPK	12.870.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>12.547.628.595,00</b>	<b>11.612.759.376,00</b>	<b>8,05</b>

Beban Persediaan  
Rp65.553.857,00.

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.553.857,00 dan Rp111.914.025,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa Alat Tulis Kantor, Computer Suplies.

Perbandingan Rincian Beban 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	30 Sep 2025	30 Sep 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	65.553.857	111.914.025,00	-
Beban Persediaan untuk tujuan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>65.553.857</b>	<b>111.914.025</b>	<b>0</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp16.443.442.608,00.

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.443.442.608,00 dan Rp7.873.717.362,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31  
Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.072.735.806	1.622.406.879	151%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	257.957.950	275.298.906	107%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.593.700	8.354.638	232%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115.490.000	113.752.000	98%
Beban Bahan	12.129.582.882	3.448.300.271	28%
Beban Honor Output Kegiatan	10.000.000	25.500.000	255%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	794.950.666	487.935.480	61%
Beban Barang Operasional Lainnya	428.327.214	528.828.300	123%
Beban Langganan Listrik	357.157.737	239.063.521	67%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0%
Beban Sewa	314.136.733	424.198.750	135%
Beban jasa profesi	0	25.600.000	0%
Beban Jasa Lainnya	889.840.571	602.254.562	68%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0%
Beban Langganan Telepon	36.992.371	39.712.627	107%
Beban Langganan Air	32.676.978	32.511.428	99%
Beban Barang Operasional-Penanganan Covid	0	0	0%
beban jasa konsultan	0	0	0%
Beban Jasa Operasional-Penanganan Covid	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>16.443.442.608</b>	<b>7.873.717.362</b>	<b>108,84</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp2.157.811.045,00.

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.157.811.045,00 dan Rp 3.430.499.695,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.700.487	457.348.566	(66,61)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.653.893.461	2.739.363.483	(39,62)
Beban Pemeliharaan Jaringan		0	100,00
Beban barang persediaan pemeliharaan	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	351.210.097	233.787.646	50,23
<b>Jumlah</b>	<b>2.157.811.045</b>	<b>3.430.499.695</b>	<b>(37,10)</b>

penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan suku cadang ini berupa suku cadang KP, HIU 09 dan Speedboat.

Beban Perjalanan Dinas  
Rp1.120.062.165,00.

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.120.062.165,00 dan Rp4.710.466.901,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.100.630.542	4.223.177.826	-73,94
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.893.000	70.750.000	-86,02
Belanja Perjalanan Tetap	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.538.623	396.159.075	-97,59
Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	0	20.380.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.120.062.165</b>	<b>4.710.466.901</b>	<b>-76,22</b>

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0.

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp1.637.314.903,00.

#### D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.637.314.903,00 dan Rp1.485.154.654,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.380.093.745	1.246.586.773	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	189.282.658	174.457.395	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	55.356.254	55.356.254	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	12.582.246	8.754.232	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.637.314.903</b>	<b>1.485.154.654</b>	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.637.314.903</b>	<b>1.485.154.654</b>	10,25

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih  
Rp0.

#### D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	30 Des 2024	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp16.359.747,00.

#### **D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp16.359.747,00 dan Rp12.202.000,00. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	30 Sep 2024	30 Sep 2023	NAIK (TURUN)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	16.359.747	12.202.000	25,41
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	16.359.747	12.202.000	25,41
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Penyesuaian nilai Persediaan	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0	0	
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>16.359.747</b>	<b>12.202.000</b>	<b>34,07</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.*

Pos-Pos Luar Biasa **D.11 POS-POS LUAR BIASA**

Rp0.

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

**E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp151.019.192.355,00

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp151.019.1992.355,00 dan Rp22.996.726.522,00.

Defisit LO  
Rp(33.955.453.426)

**E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp33.955.453.426 dan Rp(29.212.310.013). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar  
Rp0.

**E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0.

**E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0

**E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp(0,00).

### E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp(0),00

### E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp10.696.767.000,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Lain-lain Rp0,00.

### E.3.6 lain-lain

Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.500,00.

Transaksi Antar Entitas Rp37.818.870.246,00.

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.818.870.246,00 dan Rp167.930.538.346,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	37.818.870.246
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesehan Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>37.818.870.246</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 senilai Rp 0,00

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Rp	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Ekuitas Akhir  
Rp154.882.609.175,00

**E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp154.882.609.175,00 dan Rp151.019.192.355,00.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

- PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	
	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		-
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	11.033.463.000	12.557.913.000
Belanja Barang	24.344.055.000	22.500.074.000
Belanja Modal	5.746.181.000	364.621.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>41.123.699.000</b>	<b>35.422.608.000</b>

Penjelasan revisi pagu anggaran yang berada di Pangkalan PSDKP Benoa terdiri dari:

- Revisi ke 1 Tanggal 30 Januari 2025 Adanya Pemutakhiran Data dan petunjuk operasional kegiatan tanpa merubah nilai pagu senilai Rp. 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 2 Tanggal 24 Februari 2025 adanya pemutakhiran rencana penarikan dana dan adanya penambahan blokir perjalanan dinas tanpa merubah nilai pagu senilai Rp. 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 3 Tanggal 24 Maret 2025 adanya perpindahan output Cadangan pada kegiatan perawatan armada kapal pengawas tanpa merubah nilai pagu senilai Rp. 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 4 Tanggal 14 April 2025 adanya pembukaan blokir anggaran operasi kapal pengawas dan operasional perkantoran tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi Ke 5 tanggal 22 April 2025 adanya pemutakhiran rencana penarikan dana tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi ke 6 tanggal 23 Mei 2025 adanya pembukaan blokir sumber dana PNBK operasional kapal pengawas senilai Rp. 6.967.777.000 tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi ke 7 tanggal 14 Juli 2025 adanya revisi Hal III DIPA dan pemutakhiran data tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00
- Revisi ke 8 tanggal 14 Oktober 2025 adanya Pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW 4 tahun anggaran 2025 tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 41.123.699.000,00

- Revisi ke 9 tanggal 19 November 2025 adanya Penghapusan dan buka Blokir Anggaran Sehingga Mengurangi Pagu menjadi senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 10 tanggal 26 November 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 11 tanggal 11 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 12 tanggal 11 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 13 tanggal 24 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00
- Revisi ke 14 tanggal 29 Desember 2025 adanya Pemutakhiran hasil POK tanpa merubah nilai pagu senilai Rp 35.422.608.000, 00

Susunan SK Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.143/MEN/KU.611/2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan pengangkatan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Data Pengelola Keuangan

No	Nama / NIP	Tugas
1	Edi Purnomo, S.St.Pi.,M.Si NIP.19840622 200901 1 004 Pembina IVa	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Musyafak, S.Pi NIP. 19840320 200912 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIId	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Yudi Gusworo Saputro, S.St.Pi NIP. 198608312010121003 Penata TKI IIIId	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4	Alek Harjowiono, SE NIP. 19860423 201012 1 002 Penata Muda TkI/IIIb	Bendahara Pengeluaran

Nilai BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya pada Pangkalan PSDKP Benoa 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai BMN	Jumlah	Sudah PSP	Jumlah	Belum PSP	Jumlah
		(Rp)	Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	Unit
1	Tanah	139.850.310.000	3	2.001.657.000	2	137.848.653.000	1
2	Peralatan dan Mesin	72.163.369.393	1.038	71.341.090.393	1.036	96.915.000	2
3	Gedung dan Bangunan	8.920.338.606	24	7.437.812.322	19	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	502.474.796	14	187.033.700	13	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Bangunan Air	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>							

### F.3 TEMUAN BPK

Pangkalan PSDKP Benoa telah di audit oleh Tim Pemeriksa BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat temuan BPK.

### F.5 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pangkalan PSDKP Benoa per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Bank : BRI Cabang Denpasar Renon  
 Nomor Rekening : 0368-01-002354-30-8  
 Rekening atas Nama : BPG 037 Pangkalan PSDKP Benoa  
 Per Bulan Januari 2020 dirubah Menjadi :  
 Nama Bank : Mandiri Cabang Benoa  
 Nomor Rekening : 1450066789989  
 Rekening atas Nama : BPG 037 Pangkalan PSDKP Benoa

### F.6 PENJELASAN SISA BBM KAPAL PENGAWAS PANGKALAN PSDKP BENOA

Pangkalan PSDKP Benoa terdapat sisa BBM Kapal Pengawas Hiu 09 dan Hiu Macan Tutul 02 per tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

#### Kapal Pengawas Hiu 09

Nama Kapal	Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	c	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu 09	Desember	31 Desember 2024	3.650	10.100	8.570	5.180
	Januari	31 Januari 2025	5.180	-	1.810	3.370
	Februari	28 Februari 2025	3.370	-	1.300	2.070
	Maret	27 Maret 2024	2.070	8.000	980	9.090
	April	30 April 2025	9.090	-	1.300	7.790
	Mei	31 Mei 2025	7.790	-	1.040	6.750
	Juni	30 Juni 2025	6.750	15.000	12.730	9.020
	Juli	31 Juli 2025	9.020	-	1.040	7.980
	Agustus	30 Agustus 2025	7.980	15.000	16.170	6.810
	September	30 September 2025	6.810	-	840	5.970
	Oktober	31 Oktober 2025	5.970	32.000	32.870	5.100
	November	30 November 2025	5.100	6.000	9.730	1.370
Desember	31 Desember 2025	1.370	32.000	24.320	9.050	

**Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02**

Nama Kapal	Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	c	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu Macan tutul 02	Desember	31 Desember 2024	51.300	56.000	61.300	46.000
	Januari	31 Januari 2025	46.000	-	12.000	34.000
	Februari	28 Februari 2025	34.000	-	11.400	22.600
	Maret	27 Maret 2024	22.600	30.000	47.100	5.500
	April	30 April 2025	5.500	48.000	25.500	28.000
	Mei	31 Mei 2025	28.000	32.000	34.600	25.400
	Juni	30 Juni 2025	25.400	28.000	600	52.800
	Juli	31 Juli 2025	52.800	14.000	14.000	52.800

Agustus	30 Agustus 2025	52.800	32.000	31.800	53.000
September	30 September 2025	53.000	64.000	64.700	52.300
Oktober	31 Oktober 2025	52.300	105.000	104.300	53.000
November	30 November 2025	53.000	75.000	76.500	51.500
Desember	31 Desember 2025	51.500	80.000	102.500	29.000